

## DPR DORONG ISLAMIC GROUP SATU POSISI TEGASKAN PRINSIP KEDAULATAN DI IPU



DPR RI mendorong Islamic Group yang ada di Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk memiliki satu posisi yang sama dalam penegasan prinsip kedaulatan negara dari intervensi asing. Dorongan ini diperlukan lantaran parlemen negara-negara Islamic Group di IPU ini, yang juga merupakan anggota Parliamentary Union of OIC (PUIC), memiliki usulan yang berbeda terkait resolusi darurat (emergency item) yang diajukan di IPU.

Saat ini, per 23 Oktober 2016, ada tujuh usulan resolusi darurat di IPU yakni: the negative effects of unilateral coercive economic measures on human rights and the contradiction between two; Helping to consolidate international peace and security through the recognition of a viable, independent and sovereign Palestinian State with East Jerusalem as its Capital: the role of parliaments; Role of parliamentarians in protecting the principle of sovereignty and immunity of states from subordination of the national justice to any state, and the adoption of any unilateral legislations that subvert this principle which is considered a violation of the principles of international law and international treaties as well as the UN Charter; Respecting the separation of power as an essential element of democratic systems and as a guarantee of the proper functioning of parliaments as unique institutions within democracies, guaranteeing the safety of migrants on their way to countries of destination; the severe humanitarian crisis in Aleppo (Syria): the responsibility to protect the civilian of population, guarantee their fundamental rights and safeguard the heritage of humanity; the war and humanitarian situation in Syria, particularly in Aleppo. Tiga usulan resolusi darurat pertama diusulkan oleh negara anggota PUIC yakni secara berturut turut: Suriah, Maroko, dan Arab Saudi. "Ketiga negara ini mengajukan resolusi darurat dengan motif berbeda-beda. Tetapi ada satu garis besar yang sama, yakni isu mengenai kedaulatan.

Ini jadi kata kunci," jelas Wakil Ketua BKSAP, Rofi Munawar saat menghadiri pertemuan Islamic Group di 135th IPU Assembly and related meetings, Switzerland, Minggu (23/10).

DPR, urai Rofi, mendorong agar isu kedaulatan menjadi penyatu beragam pandangan dari negara-negara grup PUIC tersebut. Ia bahkan akan melobi lebih lanjut untuk mengkombinasikan isu kedaulatan dengan tantangan kemanusiaan yang saat ini dihadapi dunia. Dengan demikian, isu ini akan mendapatkan dukungan lebih luas dari sekitar 160 parlemen anggota IPU.

Politisi PKS itu lebih lanjut menjelaskan bahwa Suriah memiliki kepentingan atas pemberlakuan sanksi ekonomi yang kemudian berdampak pada HAM individu termasuk pada pelarangan bepergian, sementara Saudi memiliki kepentingan atas langkah Kongres AS yang mengesahkan UU yang membolehkan warga AS menggugat Saudi atas tragedi 9/11. "Sementara Maroko mengangkat isu utama PUIC yakni soal Palestina. Isu-isu ini berkaitan dengan bagaimana kita sebagai negara nasional membentengi kedaulatan kita dan kemudian untuk tidak tunduk pada asing. Di sisi lain, banyak dari kita memiliki tantangan kemanusiaan dalam beragam konflik yang terjadi seperti di Suriah, Palestina dan lain sebagainya," tandasnya.

Memiliki satu suara bagi Islamic Group menurut dia adalah sangat penting untuk menunjukkan kebulatan tekad umat Islam dalam sebuah isu. Ia juga menandaskan pentingnya agar Islamic Group baik dalam IPU maupun di PUIC itu sendiri dapat memiliki sinergi mekanisme kerja dan konektivitas yang baik dengan organisasi kerja sama Islam (OKI). "Ini yang jadi catatan saya karena sejauh ini kerja-kerja PUIC berikut keputusannya tidak terhubung langsung dengan OKI. Perlu ada mekanisme lebih baik agar PUIC dan OKI dapat bersinergi," pungkasnya.